

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rusia dan Georgia adalah dua negara bekas Uni Soviet yang memiliki ikatan historis yang kuat; Rusia adalah pusat kekuatan Uni Soviet dengan ibukotanya Moskow dan Georgia adalah tanah kelahiran beberapa pemimpin Uni Soviet seperti Iosif V. Djugashvili (Stalin), Lavrenty P. Beria dan Eduard A. Shevardnadze. Namun demikian ikatan ini ternyata tidak cukup untuk membendung semangat nasionalisme Georgia yang meningkat pada tahun-tahun terakhir dekade 80-an. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 merupakan momen bagi Georgia untuk menentukan nasibnya sendiri dan sejak saat itu hubungan kedua negara yang dahulunya bersatu diwarnai dengan ketegangan dan bahkan konflik bersenjata.

Ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Georgia adalah antara lain seputar Ossetia Selatan, yaitu sebuah daerah di Georgia yang berbatasan langsung dengan Rusia. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah teritorial Georgia namun secara historis memiliki status wilayah otonom (*autonomous oblast*) yang diperoleh saat masih berada di bawah Uni Soviet. Penduduk Ossetia Selatan sebagian terdiri dari etnis Rusia sehingga merasa lebih mempunyai kedekatan dengan Rusia dan memiliki keinginan untuk bersatu dengan saudara-saudaranya di Ossetia Utara (yang merupakan bagian dari Rusia). Krisis otoritas yang dialami Uni Soviet menjelang keruntuhannya memberikan jalan bagi Ossetia Selatan untuk mengupayakan kemerdekaannya namun mendapat tantangan keras dari Georgia.

Upaya-upaya ini berujung pada perang terbuka: pada bulan Januari 1991, pasukan pemerintah Georgia menduduki Tskhinvali – ibukota Ossetia Selatan – yang mengakibatkan kota tersebut terpisah menjadi dua (sisi Ossetia dan sisi Georgia) serta berada dalam suasana perang selama 1 tahun.¹ Peristiwa ini berakhir dengan gencatan senjata yang antara lain diawasi oleh Rusia melalui

¹ International Crisis Group, *Georgia: Avoiding War in South Ossetia (Europe Report No. 159)*, Tbilisi/Brussels: ICG, 26 November 2004, h. 3-4.

pasukan JPKF.² Setelah peristiwa ini Ossetia Selatan secara *de facto* menjadi republik independen walaupun secara *de jure* tetap dianggap sebagai bagian dari wilayah teritorial Georgia oleh dunia internasional.

Keterlibatan Rusia dalam peristiwa inilah yang menjadi titik ketegangan antara Georgia dengan Rusia. Georgia menuduh Rusia mencampuri apa yang menjadi urusan dalam negerinya sementara Rusia menuduh Georgia melakukan diskriminasi terhadap penduduk setempat (yang notabene sangat pro-Rusia). Selama masa jabatan Presiden Eduard Shevardnadze – yang pernah menjadi menteri luar negeri Uni Soviet pada era Gorbachev – Georgia mengalihkan perhatiannya dari Ossetia Selatan sehingga berhasil mengurangi ketegangan antara kedua negara tersebut dan ‘membekukan’ konflik yang terjadi. Namun demikian ‘Revolusi Mawar’ pada bulan November 2003 yang memaksa Shevardnadze untuk mundur dari jabatannya mengubah segalanya; pengganti Shevardnadze yaitu Mikheil Saakashvili melancarkan retorika negatif terhadap Rusia atas campur tangannya di Ossetia Selatan. Menurut Saakashvili, konflik di Ossetia Selatan tersebut bukan merupakan konflik etnis melainkan “konflik politik yang dipaksakan...dan terkait dengan upaya kekuatan-kekuatan pasca-Soviet dengan mentalitas imperialis Soviet kuno untuk merebut kendali atas sebagian wilayah sekitarnya...Georgia adalah bagian yang paling menarik untuk dicaplok, dan di masa lalu mereka berhasil melakukan ini atau setidaknya menciptakan masalah bagi Georgia.”³

Selain itu, Saakashvili memberi sinyal akan ‘mencairkan’ konflik yang telah lama beku ini melalui pernyataan-pernyataan yang menegaskan hak Georgia atas keutuhan wilayahnya. Dalam pidato pengukuhanannya pada bulan Januari 2004, Saakashvili menyatakan bahwa “keutuhan teritorial Georgia adalah tujuan hidup saya.”⁴ Saakashvili – yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat – mendukung retorikanya dengan menjalin kerja sama dengan NATO dan meningkatkan anggaran pertahanannya: pada tahun 2006 angka tersebut mencapai sekitar USD 373,5 juta dan setahun kemudian

² JPKF atau *Joint Peacekeeping Forces* adalah pasukan penjaga perdamaian trilateral yang terdiri dari tentara Rusia, Georgia, dan Ossetia.

³ Pidato Presiden Saakashvili kepada rakyat Georgia pada tanggal 16 Juli 2006, dikutip di International Crisis Group, *op. cit.*, h. 7; terjemahan oleh penulis.

⁴ Dikutip di *ibid.*; terjemahan oleh penulis.

melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar USD 922 juta.⁵ Menurut pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Rusia, dalam kurun waktu 2005 hingga 2008 terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah senjata ofensif yang dimiliki Georgia: jumlah tank meningkat dari 98 ke 138, kendaraan tempur (ranpur) dari 83 ke 134, artileri di atas kaliber 100 mm dari 96 ke 238, helikopter tempur dari 3 ke 9, dan pesawat tempur dari 7 ke 9.⁶

Manuver Saakashvili ini diterima dengan kekhawatiran oleh Ossetia Selatan dan Rusia karena Saakashvili menunjukkan bahwa ia tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan militer demi memenuhi janjinya. Saakashvili semakin keras menuduh Rusia sementara Presiden Rusia (pada waktu itu) Vladimir Putin merespon dengan mengeluarkan paspor Rusia bagi penduduk Ossetia Selatan yang beretnis Rusia dan mempertimbangkan pemberian pengakuan atas kemerdekaan Ossetia Selatan dengan alasan melindungi kepentingan penduduk setempat. Perang kata-kata antara kedua pemimpin ini diikuti oleh insiden-insiden yang semakin memperburuk hubungan kedua negara seperti deportasi atas warga negara Georgia oleh Rusia, sabotase terhadap jalur pipa gas di Ossetia Utara, dan larangan terhadap penjualan anggur Georgia.⁷ Insiden-insiden ini semakin mengarah pada konfrontasi militer ketika terjadi pelanggaran perbatasan oleh angkatan udara kedua negara yang disertai peningkatan kekuatan militer di Ossetia Selatan. Tentara Georgia terlibat baku tembak dengan milisi Ossetia Selatan dekat Tskhinvali, dan pesawat-pesawat Rusia dilaporkan melakukan penerbangan di atas Ossetia Selatan yang merupakan pelanggaran terhadap ruang udara Georgia.⁸

Titik puncak dari ketegangan ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 2008 dini hari. Saakashvili memutuskan untuk memulihkan kendali Tbilisi atas “rezim kriminal” di Ossetia Selatan dengan melancarkan serangan militer besar-besaran ke Tskhinvali. Tidak lama setelah serangan Georgia dimulai, Rusia merespon dengan mengirim pasukannya ke Ossetia Selatan dan memulai intervensinya

⁵ International Crisis Group, *Georgia: Sliding towards Authoritarianism? (Europe Report No. 189)*. Tbilisi/Brussels: ICG, 19 Desember 2007, h. 11-12.

⁶ Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Rusia yang dikutip oleh harian *Pravda*. <<http://english.pravda.ru/russia/politics/106544-originssouthossetia-0>> (diakses 6 Oktober 2008).

⁷ International Crisis Group, *op. cit.*, h. 8.

⁸ *Ibid.*, h. 9.

terhadap Georgia. Dalam pernyataannya Presiden Rusia Dmitry Medvedev – pengganti Putin – mengatakan bahwa tentara Georgia telah melakukan “tindakan agresi terhadap penjaga perdamaian Rusia dan penduduk sipil Ossetia Selatan.” Medvedev kemudian mengatakan bahwa Rusia memiliki “kewajiban untuk melindungi nyawa dan kehormatan warga negara Rusia dimanapun mereka berada” dan akan memberi “hukuman yang setimpal bagi para pelaku.”⁹ Selain itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa “apapun hak yang dimiliki oleh Georgia atas [Ossetia Selatan] hilang saat Tskhinvali dibom pada waktu malam.”¹⁰

Intervensi Rusia ini direaksi secara negatif terutama oleh negara-negara Barat dan organisasi internasional seperti Uni Eropa, NATO, dan OSCE. Berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur dianggap sebagai titik awal tatanan dunia baru dimana kerja sama dan dialog menggantikan konflik dan kekerasan sebagai metode penyelesaian masalah atau sengketa antarnegara; sebuah tatanan dimana kekuatan-kekuatan besar tidak akan lagi mendikte negara-negara tetangganya mengenai urusan dalam negerinya.¹¹ Bergabungnya sejumlah negara bekas Blok Timur ke Uni Eropa serta bergabungnya Rusia ke dalam institusi G8 seperti membuktikan *trend* kerja sama ini. Oleh sebab itu intervensi Rusia menimbulkan kekhawatiran baru terhadap ‘ancaman merah’ yang menjadi momok selama Perang Dingin dan bahkan kemungkinan munculnya ‘Perang Dingin Baru’ antara Rusia dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.¹²

Kekhawatiran ini terutama didukung oleh kebangkitan Rusia sebagai akibat dari meningkatnya harga minyak dunia dan kepemimpinan tangan dingin Putin selama dua periode.¹³ Putin dianggap sebagai “penyelamat Rusia dari kehancuran ekonomi [yang] memulihkan kembali peran [Rusia] yang sempat

⁹ Pernyataan Presiden Medvedev di Kremlin, Moskow pada tanggal 8 Agustus 2008. <http://kremlin.ru/eng/text/speeches/2008/08/08/1553_type82912type82913_205032.shtml> (diakses 15 September 2008); terjemahan oleh penulis.

¹⁰ Pernyataan Menlu Lavrov pada Sidang Umum PBB ke-63 yang dikutip oleh harian *Pravda*. <http://english.pravda.ru/world/europe/106477-europe_russia-0> (diakses 6 Oktober 2008); terjemahan oleh penulis.

¹¹ Zbigniew Brzezinski, “Staring Down the Russians”, *TIME Asia*, 25 Agustus 2008, h. 18.

¹² Edward Lucas, *The New Cold War: Putin’s Russia and the Threat to the West*, New York: Palgrave Macmillan, 2008, h. 2.

¹³ Dmitry Trenin, “Russia’s Strategic Choices”, *Carnegie Endowment for International Peace Policy Brief #50*, Mei 2007, h. 1.

memudar di dunia internasional.”¹⁴ Setelah Uni Soviet secara resmi ‘berakhir’ pada tanggal 31 Desember 1991, Rusia yang menjadi pewarisnya secara drastis berubah dari kekuatan dunia menjadi negara papa. Perekonomian Rusia mengalami penyusutan sebesar 50 persen dalam kurun waktu 1991 hingga 1997.¹⁵ Rusia harus menerima kenyataan bahwa pengaruhnya atas kawasan sekitarnya berkurang drastis; negara-negara yang dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet (dikenal dengan istilah *blizhnee zarubezhe* atau *near abroad*) seperti Latvia, Lithuania dan Estonia maupun anggota Pakta Warsawa seperti Polandia, Hungaria dan Republik Ceko berangsur-angsur ‘membelot’ dan bergabung dengan NATO. Rusia semakin dikesampingkan dalam politik internasional seperti dalam kasus Kosovo. Aksi NATO di Kosovo serta perluasan keanggotaan NATO mendekati perbatasan Rusia membangkitkan lagi bayangan mengenai ancaman militer Barat di mata Rusia.¹⁶ Setelah sekian lama merasa dipermalukan, ditolak dan dicemooh, Rusia ingin menunjukkan kebangkitan dirinya.¹⁷ Dalam konteks ini, intervensi militer dianggap sebagai upaya yang jitu untuk memulihkan kehormatan dan mengonsolidasikan kekuatan Kremlin paska-Putin di bawah kepemimpinan Dmitry Medvedev.¹⁸

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **“Mengapa Rusia melakukan intervensi militer terhadap Georgia di Ossetia Selatan?”** Penelitian ini akan memfokuskan pada faktor-faktor yang menjadi latar belakang keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer tersebut.

¹⁴ Simon Saragih, *Bangkitnya Rusia: Peran Putin dan Eks-KGB*, Jakarta: Kompas, 2008, h. 85.

¹⁵ Vitaly V. Shlykov, *The Crisis in the Russian Economy*, Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, 30 Juni 1997, h. 1.

¹⁶ Bill Bradley, “Eurasia Letter: A Misguided Russia Policy”, *Foreign Policy*, No. 101 (Winter 1995-1996), h. 92; lihat pula Alexei G. Arbatov, “The Transformation of Russian Military Doctrine: Lessons Learned from Kosovo and Chechnya”, *The Marshall Center Papers No. 2*, Juli 2000, h. 2.

¹⁷ Trenin, *loc. cit.*

¹⁸ Roy Allison, “Russia resurgent? Moscow’s campaign to ‘coerce Georgia to peace’”, *International Affairs* 84:6 (2008), h. 1169.

1.3 Signifikansi Penelitian

Intervensi militer Rusia terhadap Georgia membawa implikasi yang besar terhadap dinamika politik kawasan dan juga internasional. Insiden ini merupakan kali pertama Rusia mengirim pasukannya untuk operasi militer di luar wilayah teritorialnya sendiri sejak lepas dari Uni Soviet pada tahun 1992. Selain menciptakan ketegangan dan kecurigaan terhadap Rusia diantara negara-negara *near abroad*, hubungan Rusia dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat semakin menuju titik nadir dan bahkan ditakutkan akan mengarah ke sebuah Perang Dingin baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer terhadap Georgia. Untuk ke depan, penelitian ini diharapkan akan memberi kejelasan tentang pemikiran politik Rusia paska-Putin; selain itu penelitian ini juga diharapkan akan membuka jalan terhadap diskusi dan analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan berubahnya situasi geopolitik kawasan dan juga dunia sebagai implikasi dari tindakan Rusia ini.

1.4 Tinjauan Pustaka

Ide untuk penelitian ini berawal dari sebuah tulisan dalam majalah *TIME Asia* edisi 25 Agustus 2008. Dalam artikel berjudul “*A Question of Honor*”, Samantha Power menulis bahwa intervensi militer Rusia terhadap Georgia adalah manifestasi kepentingan nasional (*national interest*) Rusia yang berasal dari persepsi atas rasa hina (*humiliation*). Power menyatakan bahwa semenjak runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami penurunan kekuatan yang dramatis serta kehilangan statusnya sebagai *superpower*.¹⁹ NATO yang dahulu merupakan musuh memperluas keanggotaannya dan semakin mendekati perbatasan Rusia. Dan dalam kasus Kosovo, Rusia secara tegas membela sekutunya Serbia dan menunjukkan penolakannya terhadap rencana NATO untuk melakukan intervensi di Kosovo. Namun demikian sikap Rusia tersebut tidak digubris oleh NATO dan intervensi militer NATO berupa serangan udara tetap dilancarkan terhadap Serbia. Tindakan NATO ini menjadi bukti nyata bahwa kepentingan Rusia tidak

¹⁹ Samantha Power, “A Question of Honor”, *TIME Asia*, 25 Agustus 2008, h. 15.

diperhatikan oleh negara-negara Barat dan Rusia tidak diperhitungkan lagi di pentas dunia.

Persepsi inilah yang kemudian mendorong Rusia untuk menggunakan kekuatan militernya dengan tujuan memulihkan statusnya di mata dunia internasional. Argumen ini ditunjang oleh tulisan Lilia Shevtsova dari Chatham House dengan judul “*After the Battle: What the August Conflict will mean to Russia’s Domestic Politics*”. Dalam tulisan ini Shevtsova menyatakan bahwa intervensi Rusia ini lebih disebabkan oleh faktor domestik ketimbang faktor eksternal, yakni dorongan dan “determinasi dari para elite penguasa Rusia untuk mengembalikan model tradisional negara Rusia, yaitu sebuah negara yang tidak dapat hidup dan mempertahankan hidupnya tanpa lingkaran-lingkaran pengaruh (*spheres of influence*), postur *macho* dan pencarian musuh.”²⁰ Menurut Shevtsova, tindakan Rusia ini menunjukkan bagaimana Putin dan Medvedev menggunakan kebijakan luar negeri sebagai alat untuk menciptakan sebuah Rusia yang kuat, berdaulat, dan memiliki otoritas penuh atas wilayah *near abroad*, kalau perlu dengan menggunakan kekuatan militer.

Penelitian ini ingin menggali lebih dalam argumen yang dikemukakan Power dan Shevtsova dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan intervensi militer Rusia terhadap Georgia, terutama faktor-faktor yang berasal dari dalam negeri (domestik) Rusia sendiri.

1.5 Kerangka Konseptual

Menurut Paul Viotti dan Mark Kauppi, pendekatan realisme dalam hubungan internasional berpegang pada empat asumsi kunci mengenai dunia secara umum. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

- 1) Negara adalah aktor yang paling penting dan paling dominan. Negara merupakan tingkat analisa yang paling relevan dalam realisme, dan ilmu hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan diantara aktor-aktor negara.²¹

²⁰ Lilia Shevtsova, Chatham House briefing note REP BN 08/02, September 2008, h. 2; terjemahan oleh penulis.

²¹ Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism*,

- 2) Negara dipandang sebagai aktor tunggal. Dalam konteks ini, realisme mengasumsikan bahwa perbedaan-perbedaan politik yang terjadi dalam suatu negara diselesaikan secara internal dan pemerintah berbicara dengan satu suara mewakili kepentingan nasional negara. Hal ini berarti bahwa suatu negara diasumsikan hanya memiliki satu kebijakan untuk satu kasus dalam satu waktu tertentu.²²
- 3) Negara adalah aktor yang rasional. Maksud dari asumsi ini adalah bahwa keputusan yang diambil atau kebijakan yang diterapkan oleh negara merupakan hasil dari proses rasional yang melibatkan pernyataan tujuan yang jelas, pertimbangan terhadap alternatif-alternatif tindakan yang sesuai dengan kemampuan negara, kemungkinan tercapainya tujuan tersebut berdasarkan alternatif yang ada, dan keuntungan yang akan diperoleh serta biaya yang akan dikeluarkan dari masing-masing alternatif tindakan. Setelah melalui proses yang rasional tersebut negara kemudian mengambil keputusan atau menerapkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi negara.²³
- 4) Keamanan nasional adalah masalah internasional yang paling penting. Isu militer dan keamanan menjadi isu yang dominan dalam politik internasional. Realisme memfokuskan pada konflik yang sedang atau akan terjadi diantara aktor-aktor negara, bagaimana mencapai atau mempertahankan stabilitas internasional, kegunaan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa, dan pencegahan pelanggaran terhadap keutuhan wilayah teritorial.²⁴

Penelitian ini menggunakan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pemikiran realisme dan konsep-konsep yang terkandung dalam kebijakan luar negeri (*foreign policy*). **Kebijakan luar negeri** memiliki beragam definisi dan pendekatan yang memberikan aspek pemahaman maupun warna tertentu dalam penelitian yang akan dilakukan. Menurut Chris Brown, kebijakan luar negeri

Globalism and Beyond (3rd ed.), Boston: Allyn & Bacon, 1999, h. 6.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 6-7.

²⁴ *Ibid.*

adalah sebuah “cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.”²⁵ Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah “ide atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan perubahan pada kebijakan, sikap, atau tindakan dari negara atau negara-negara lain, pada aktor-aktor non-negara, pada ekonomi internasional, atau pada lingkungan fisik dunia.”²⁶ Sementara itu, menurut Daniel Papp kebijakan luar negeri adalah “tindakan-tindakan terarah yang dilakukan negara demi mencapai tujuan-tujuan yang menjadi kepentingannya.”²⁷

Ketiga definisi di atas ini menyepakati satu hal yaitu bahwa kebijakan luar negeri suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional negara tersebut dalam interaksinya dengan negara-negara lain dalam sistem internasional. **Kepentingan nasional** antara lain dijabarkan oleh Holsti sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dimana terdapat sekurang-kurangnya empat tujuan yang saat ini lazim ditemukan, yaitu keamanan (*security*), otonomi (*autonomy*), kesejahteraan (*welfare*), dan prestise (*status and prestige*).²⁸ James Rosenau mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional selama ini digunakan dalam analisis politik dan tindakan politik. Rosenau menjelaskannya sebagai berikut:

*“As an analytic tool, it is employed to describe, explain, or evaluate the sources or the adequacy of a nation’s foreign policy. As an instrument of political action, it serves as a means of justifying, denouncing, or proposing policies. Both usages, in other words, refer to what is best for a national society. They also share a tendency to confine the intended meaning to what is best for a nation in foreign affairs.”*²⁹

Sementara itu Hans Morgenthau memberi penjelasan mengenai kepentingan nasional sebagai berikut:

²⁵ Chris Brown & Kirsten Ainley, *Understanding International Relations* (3rd ed.), London: Palgrave MacMillan, 2005, h. 63; terjemahan oleh penulis.

²⁶ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis* (7th ed.), New Jersey: Prentice-Hall, 1995, h. 83; terjemahan oleh penulis.

²⁷ Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding* (5th ed.), Boston: Allyn & Bacon, 1997, h. 134; terjemahan oleh penulis.

²⁸ Holsti, *op.cit.*, h. 84.

²⁹ James N. Rosenau, *The Study of World Politics (Vol. 1: Theoretical and Methodological Challenges)*, London: Routledge, 2006, h. 246.

*“...the kind of interest determining political action in a particular period of history depends upon the political and cultural context within which foreign policy is formulated. The goals that might be pursued by nations in their foreign policy can run the whole gamut of objectives any nation has ever pursued or might possibly pursue.”*³⁰

Morgenthau kemudian mengatakan bahwa “sasaran-sasaran dari kebijakan luar negeri harus didefinisikan dalam hubungannya dengan kepentingan nasional.”³¹ Holsti mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa kepentingan nasional utamanya berasal dari dalam negara itu sendiri, atau dengan kata lain merupakan refleksi dari kebutuhan domestik.³² Namun demikian kebijakan luar negeri juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sistem internasional maupun kebijakan negara-negara lain.

Setiap negara memiliki skala prioritas dan strategi yang berbeda-beda terhadap pencapaian kepentingan nasionalnya. Salah satu cara yang dilakukan negara adalah melalui konsep terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu **intervensi militer**. Kekuatan (*power*) adalah konsep yang sangat penting dalam realisme. Viotti dan Kauppi mendefinisikan *power* sebagai berikut:

“...a state’s influence (or capacity to influence or coerce)...is determined [not only] by its capabilities (or relative capabilities) but also by [its] willingness (and perceptions by other states of its willingness) to use these capabilities and its control or influence over other states”.³³

Oleh karena itu berdasarkan definisi ini intervensi militer merupakan sebuah kebijakan yang diambil negara untuk menunjukkan kekuatannya. Menurut Holsti intervensi didefinisikan sebagai “segala kegiatan yang secara sengaja bertujuan untuk mengganti pimpinan politik atau struktur konstitusional dari sebuah yurisdiksi politik asing”, dengan asumsi bahwa kegiatan tersebut dilakukan “tanpa persetujuan atau bertentangan dengan kehendak dari otoritas

³⁰ Hans J. Morgenthau & Kenneth W. Thompson, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (6th ed.), New York: Alfred A. Knopf, 1985, h. 586; terjemahan oleh penulis.

³¹ *Ibid.*, h. 11.

³² Holsti, *op. cit.*, h. 256-266.

³³ Viotti & Kauppi, *op. cit.*, h. 64-65.

yang diakui atau yang dilegalkan.”³⁴ Dari sudut pandang hukum internasional, Oppenheim memberi definisi intervensi sebagai berikut:

*“Intervention is a dictatorial interference by a State in the affairs of another State for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things. Such intervention can take place by right or without right, but it always concerns the external independence or the territorial or personal supremacy of the State concerned, and the whole matter is therefore of great importance for the international position of States.”*³⁵

Sementara itu intervensi militer didefinisikan oleh Herbert Tillema sebagai berikut:

*“...the beginning of military acts by the official armed forces of one state beyond its own borders and within the territory of another country, including...the deployment of combat troops in battle or in a combat-ready mode.”*³⁶

Holsti menyebutkan intervensi militer sebagai salah satu bentuk intervensi yang bercirikan pengiriman pasukan dalam jumlah besar untuk melindungi atau sebaliknya untuk menggulingkan rezim yang berkuasa.³⁷ Lazimnya, intervensi militer merupakan respons dari sebuah krisis dimana pengiriman pasukan dilakukan dengan cepat dan tidak jarang menciptakan kejutan bagi rezim atau pemberontak yang menjadi sasaran.³⁸ Intervensi militer tidak selalu disamakan dengan atau mengakibatkan perang, namun resiko itu selalu ada karena apabila pihak yang diintervensi melakukan perlawanan atau terjadi intervensi lain dari pihak ketiga maka intervensi militer dapat dianggap sebagai tindakan perang.³⁹

Penelitian ini selain membahas intervensi militer Rusia terhadap Georgia juga membahas intervensi-intervensi militer yang terjadi pada masa Uni Soviet. Alasannya adalah karena intervensi-intervensi yang terjadi di masa lalu tersebut memberikan latar belakang historis terhadap keputusan Rusia pada tanggal 8

³⁴ Holsti, *op. cit.*, h. 195-196; terjemahan oleh penulis.

³⁵ L. F. L. Oppenheim, *International Law: A Treatise (Vol. I – Peace)* (8th ed.), Ed. H. Lauterpacht, London: Longmans Green, 1955, h. 305.

³⁶ Herbert K. Tillema & John R. Van Wingen, “Law and Power in Military Intervention: Major States after World War II”, *International Studies Quarterly* 26:2 (1982), h. 224.

³⁷ Holsti, *op. cit.*, h. 206.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Tillema & Van Wingen, *loc. cit.*

Agustus 2008. Pemilihan Hungaria, Ceko, Slowakia dan Afghanistan sebagai contoh kasus adalah karena seperti dalam kasus Georgia, intervensi terhadap ketiga negara ini 1) menggunakan kekuatan militer secara terbuka; dan 2) melibatkan negara pengirim secara langsung, dalam arti tidak melalui pihak ketiga (*by proxy*).

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** yaitu pendekatan yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap fenomena maupun fakta. Proses penelitian kualitatif lazimnya mengikuti pola induktif dimana penelitian diawali dengan pengamatan terhadap sebuah fenomena atau fakta empiris yang spesifik dan unik yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah generalisasi empiris yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah teori baru mengenai fenomena atau fakta yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode **studi kasus** (*case study*); menurut Alan Bryman, studi kasus adalah “analisis yang seksama dan intensif terhadap sebuah kasus tunggal.”⁴⁰ Metode ini biasanya mencoba untuk memahami kompleksitas dan sifat khas dari kasus yang diteliti; fokus penelitian adalah antara lain terhadap suatu komunitas, sekolah, keluarga, organisasi, individu, atau peristiwa tertentu.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini, studi kasus yang akan dilakukan mengikuti definisi Andrew Bennett yaitu sebuah “analisis dari sebuah aspek dari suatu peristiwa sejarah yang didefinisikan dengan baik.”⁴² Menurut Bennett, suatu peristiwa sejarah terdiri dari bermacam-macam variabel bebas (*independent*) maupun terikat (*dependent*) sehingga melalui studi kasus seorang peneliti dapat memfokuskan pada aspek-aspek yang menarik baginya.⁴³

Kasus yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah intervensi militer Rusia terhadap Georgia di Ossetia Selatan yang terjadi pada tanggal 8 Agustus

⁴⁰ Alan Bryman, *Social Research Methods* (2nd ed.), New York: Oxford University Press, 2004, h. 48; terjemahan oleh penulis.

⁴¹ *Ibid.*, h. 48-49.

⁴² Andrew Bennett, “Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages”, *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, Eds. Detlef F. Sprinz & Yael Wolinsky-Nahmias, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004, h. 21; terjemahan oleh penulis.

⁴³ *Ibid.*

2008 yang lalu. **Variabel terikat** dalam kasus ini adalah keputusan Rusia untuk melakukan intervensi militer sementara **variabel bebas** dalam kasus ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan intervensi militer tersebut. Penelitian ini akan menganalisis hubungan sebab-akibat antara kedua variabel ini berdasarkan pengamatan terhadap fenomena dan fakta seputar kasus yang diteliti.

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan. Data sekunder adalah bahan rujukan yang diperoleh dari sumber-sumber seperti perpustakaan Pascasarjana HI FISIP-UI, UPDHI FISIP-UI, koleksi pribadi, maupun situs internet. Pengumpulan data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan penelitian berupa buku, ensiklopedia, artikel dari majalah, surat kabar, atau jurnal ilmiah, kliping, siaran pers, serta penelitian yang terdahulu.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diajukan agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian atau pembabakan sebagai berikut:

BAB 1 merupakan bagian pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB 2 merupakan tinjauan historis terhadap intervensi militer yang pernah terjadi pada masa Uni Soviet (Hungaria 1956, Cekoslowakia 1968 dan Afghanistan 1979), hubungan Rusia dan Georgia semenjak runtuhnya Uni Soviet dan munculnya krisis antara kedua negara yang berakhir dengan intervensi militer Rusia di Ossetia Selatan pada bulan Agustus 2008.

BAB 3 merupakan analisis terhadap permasalahan penelitian. Bab ini akan menganalisis pandangan Rusia terhadap status dan kedudukannya di dunia lalu menguraikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab intervensi militer Rusia terhadap Georgia.

BAB 4 merupakan bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan akhir dari analisis dan rekomendasi bagi para peneliti ilmu hubungan internasional khususnya mereka yang berminat untuk melakukan studi atau analisis lanjut

terhadap fokus penelitian yang sama dan/atau serupa maupun bagi para pembuat keputusan (*decision makers*) yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri Indonesia terutama yang berkaitan dengan Rusia.

